

BAB V

KESIMPULAN

Australia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya mineral seperti biji besi, batu bara, uranium, dll. Pendapatan pemerintah Australia dari sektor pertambangan bahkan mampu mencapai puluhan miliar dollar pertahun. Sektor pertambangan menyumbang 8%-9% terhadap GDP Australia. Untuk mengoptimalkan kontribusi perusahaan tambang terhadap Australia serta memenuhi kebutuhan pembangunan nasional di negara tersebut, pada masa kepemimpinan Kevin Rudd tahun 2007-2010, Rudd menggagas sistem pajak baru bagi sumber daya mineral Australia yang disebut Resource Super Profit Tax. Gagasan *Resource Super Profit Tax* yang digagas oleh Kevin Rudd pada tahun 2010 merupakan gagasan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang untuk membayar pajak sebesar 40%. Pajak tersebut berlaku bagi perusahaan yang *return on investment* nya sebesar 6% ke atas. Artinya perusahaan-perusahaan berskala besar wajib membayar pajak sebesar 40% ditambah royalti yang sudah menjadi pertanggung jawaban mereka sebelumnya.

Gagasan RSPT ini kemudian memunculkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang kontra seperti pengusaha tambang mengatakan bahwa penerapan RSPT akan membunuh investasi mereka di sektor pertambangan. Di samping itu pula RSPT akan berdampak terhadap sekitar 2.500 perusahaan pertambangan di Australia. Mengingat bahwa dari sekitar 3000 perusahaan tambang di Australia 83% diantaranya adalah investasi asing, maka RSPT dapat mengakibatkan para pengusaha tambang menarik investasinya secara besar-besaran di Australia.

Mengingat pentingnya sektor pertambangan bagi Australia, maka perusahaan tambang bergerak secara kolektif dalam mempengaruhi keputusan politik demi mencapai kepentingan mereka. Dalam kasus RSPT perusahaan tambang melakukan upaya-upaya dalam menggagalkan

gagasan tersebut agar tidak diterapkan pada tahun 2012. Mereka melakukan strategi-strategi politik seperti melakukan taktik *lobbying*, memberikan suntikan dana terhadap partai politik, hingga menggalang dukungan melalui media massa elektronik hingga cetak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut diwadahi oleh komunitas-komunitas pertambangan yang ada di Australia.

Dalam taktik *lobbying*, perusahaan tambang menyewa para *lobbyist* dari komunitas tambang untuk menyampaikan informasi terhadap pemerintah terkait kepentingan perusahaan tambang untuk menggagalkan RSPT. Disamping itu juga mereka menyampaikan informasi mengenai dampak buruk dari penerapan RSPT di Australia. Badan *lobbying* ini dinilai cukup efektif dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah karena di dalamnya terdapat banyak mantan elit politik yang sebelumnya merupakan pejabat pemerintah yang kemudian setelah pensiun bergabung bersama komunitas-komunitas tambang dan badan yang menyewakan jasa *lobbying* bagi perusahaan-perusahaan tambang. Hal ini memudahkan tujuan pencapaian informasi ke pemerintah karena mereka telah memiliki akses ke pemerintahan secara lebih mudah. Perusahaan-perusahaan besar seperti Xstrata, RioTinto, BHP Billiton juga merupakan contoh perusahaan berskala besar yang bergerak melalui komunitas tambang dengan menyewa para *lobbyist*.

Selain melakukan taktik *lobbying* komunitas pertambangan juga melakukan *Incentif Strategy* dimana perusahaan-perusahaan tambang memberikan suntikan dana kepada partai politik di Australia seperti misalnya partai liberal, beberapa kelompok tersebut antara lain misalnya the *Minerals Council of Australia* yang menghabiskan A\$ 17.2 miliar, di samping itu juga beberapa perusahaan tambang terbesar di Australia seperti BHP Billiton menghabiskan 4.2 miliar, Rio Tinto menghabiskan dana sekitar lebih dari 537,000. Beberapa komunitas tambang

juga menyumbang sebesar 1,9 miliar dollar kepada partai oposisi. bahkan dari sisi partai oposisi komunitas tambang juga mendonasikan uang seperti misalnya Clive Palmer's Mineralogy sebesar \$700,000, Straits Resources sebesar \$500,000, Western Areas \$400,000, Savannah Nickel \$125,000 dan Lanfranchi Nickel sebesar \$125,000. Partai liberal yang menjadi partai oposisi menerima \$2.5 miliar serta partai nasional yang menerima \$211,000, dan partai Rudd sendiri yaitu partai buruh menerima \$1.7 miliar.

Strategi yang terakhir yaitu menargetkan pembuat keputusan politik dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak seperti misalnya dari partai oposisi yaitu partai liberal, masyarakat Australia, kemudian juga kepada internal partai buruh dimana pada saat itu partai buruh merupakan partai yang tengah berkuasa. Komunitas tambang menggalang dukungan melalui media massa baik itu elektronik ataupun cetak, kemudian beberapa stasiun televisi yang juga dimiliki oleh para pengusaha menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan tambang untuk mempermudah mereka dalam menggalang dukungan. Komunitas tambang juga melakukan konferensi pers melalui televisi. Efektifitas media massa sebagai wadah menggalang dukungan terbukti cukup berhasil karena aksi demonstrasi yang terjadi di Perth. Para pekerja tambang juga menuntuk gagasan RSPT tidak di terapkan pada tahun 2012.

Dengan banyaknya tekanan dari berbagai pihak bahkan dari partai pendukungnya sendiri, kemudian Rudd yang merupakan penggagas RSPT sekaligus Perdana Menteri Australia kehilangan popularitasnya dari masyarakat dan kehilangan banyak pendukung dari internal partai buruh. Disisi lain wakil Perdana Menteri yaitu Jullia Gillard yang merupakan sosok wanita yang cerdas dan dinilai cukup inovatif berhasil mengambil hati para anggota Partai Buruh hingga Rudd kemudian dikudeta dan di gantikan oleh jullia gillard. Sebagai PM baru, Gillard

menerapkan sistem pajak tambang yang baru dan menghapus gagasan atau rancangan RSPT. Sistem pajak baru yang di sepakati oleh Jullia Gillard dan komunitas tambang disebut *Mirelas Resource Rent Tax* (MMRT). MMRT mewajibkan perusahaan yang *return on investment* nya sebesar 12% ke atas membayar pajak sebesar 30% kepada pemerintah. Dengan di sepakatnya MMRT maka gagasan RSPT yag di gagas oleh Kevin Rudd telah berhasil digagalkan oleh komunitas pertambangan.